

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Januari 2026, terjadi deflasi m-to-m/y-to-d sebesar 0,47%, dan inflasi y-on-y sebesar 3,35%. Penyumbang utama deflasi Januari 2026 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,66%. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah,

Penyumbang utama inflasi Januari 2026 secara y-on-y adalah:

- Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 1,39%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif Listrik;
- Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,88%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan; dan
- Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil sebesar 0,45%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, sigaret kretek mesin (SKM), telur ayam ras, kangkung, bayam, dan ikan serai.

Inflasi y-on-y di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,40 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,59 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 11,33 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,39 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,31 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 2,61 persen; kelompok Pendidikan sebesar 2,11 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,35 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 12,18 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,63 persen; dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,24 persen.

Pada Februari 2026, terjadi inflasi m-to-m sebesar 0,58%, inflasi y-to-d sebesar 0,11%, dan inflasi y-on-y sebesar 4,59%. Penyumbang utama inflasi Februari 2026 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,41%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah.

Penyumbang utama inflasi Februari 2026 secara y-on-y adalah:

- Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil inflasi sebesar 2,09%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif Listrik;
- Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,98%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras; dan
- Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,91%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

Pada bulan Februari 2026 harga komoditas cabai merah mengalami kenaikan karena stok di pasarmulai terbatas setelah berakhirnya musim panen dari daerah pemasok seperti Sumatera Utara, Bengkulu, dan Pulau Jawa sementara permintaan terus meningkat menjelang memasuki bulan puasa, Harga komoditas daging ayam ras mengalami kenaikan pada bulan Februari 2026 karena meningkatnya permintaan menjelang bulan puasa sementara ketersediaan di pasar terbatas setelah berkurangnya suplai dari produsen lokal.

Tarif listrik bulan Februari 2026 sudah kembali normal sesuai peraturan pemerintah. Sementara pada Februari 2025 tarif listrik mengalami diskon 50%, Kenaikan harga emas perhiasan bulan Februari 2026 masih dipengaruhi oleh harga emas dunia.

Pada Maret 2026, terjadi inflasi m-to-m sebesar 0,14%, inflasi y-to-d sebesar 0,24%, dan inflasi y-on-y sebesar 3,55%. Penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,36%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ikan nila.

Penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara y-on-y adalah:

- Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras;
- Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil inflasi sebesar 1,13%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif Listrik; dan
- Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,79%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

Pada bulan Maret 2026 harga komoditas ikan nila mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan di bulan Ramadan serta kendala pasokan yang tidak sebanding dengan permintaan. Pada bulan Maret 2026 cabai merah mengalami penurunan harga, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pasokan dari masa panen di berbagai sentra produksi seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, serta produsen lokal dari Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muaro Jambi. Tarif listrik pada bulan Maret 2025 mengalami diskon 50 persen, namun pada bulan Maret 2026 sudah Kembali normal sesuai peraturan pemerintah. Harga kentang bulan Maret 2026 mengalami penurunan dikarenakan panen raya yang melimpah jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 dimana pasokan kentang cukup terjaga.

Perekonomian Provinsi Jambi 2026 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 mencapai Rp88,80 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp45,80 triliun, Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,33 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,54 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen, dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I-2026 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 34,02 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 69,94 persen.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2026 dibanding triwulan I-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,33 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali pada lapangan usaha Konstruksi yang berkontraksi sebesar 1,72 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,54 persen. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya pengadaan gas dan produksi es, seiring dengan meningkatnya jumlah pemasangan baru pelanggan gas kota di Provinsi Jambi. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 13,19 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,29 persen; Jasa Lainnya sebesar 8,81 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,46 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,94 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,19 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 6 persen. Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,02 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,60 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,47 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,56 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi mencapai lebih dari 70 persen.

Identifikasi permasalahan Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah agar mewaspadai potensi kenaikan harga bahan pokok penyumbang inflasi dan untuk segera melakukan intervensi seperti melakukan operasi pasar, gerakan pangan murah dan sidak pasar dan distributor.
2. Lebih mengaktifkan Peran TPID di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga Tim Satgas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk, agar melakukan pemantauan harga pangan setiap hari untuk mengetahui informasi penyebab terjadinya kenaikan harga.
3. Perlunya memperbanyak kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota maupun luar Provinsi untuk mengantisipasi ketersediaan pangan.
4. Masih ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi masih ragu atau masih takut untuk mempergunakan anggaran BTT.
5. Perlunya implementasi digital farming pada klaster atau Gapoktan komoditas pangan strategis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menindaklanjuti Perintah Bapak Presiden RI dan arahan dari Bapak Mendagri RI kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Bersama Mendagri RI, yang dilaksanakan seminggu sekali secara hybrid di daerah masing-masing.

Menindaklanjuti rapat mingguan Mendagri RI secara hybrid, Pemerintah Provinsi Jambi menindaklanjuti rapat tersebut dengan mengadakan rapat lanjutan, hasil rapat lanjutan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian Anomali Inflasi Daerah meskipun inflasi nasional 2025 stabil (2,92%),
2. pemerintah harus segera mengatasi status "Tidak Aman" pada beras, bawang, dan telur

di awal 2026 yang dipicu oleh gangguan cuaca ekstrem dan ketimpangan distribusi antarwilayah.

2. Optimalisasi Anggaran dan Intervensi Pasar Pemerintah Daerah wajib mengaktifkan langkah konkret secara serentak, terutama penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi logistik, operasi pasar murah, dan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
3. Penguatan Rantai Pasok dan Penyerapan Produksi mengatasi disparitas harga dengan memastikan penyerapan hasil tani oleh BUMN/BUMD, optimalisasi penggunaan gudang pendingin (*cold storage*), serta peningkatan disiplin pelaporan data ke Kemendagri sebagai basis kebijakan.
4. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan intervensi masif melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran Beras SPHP, khususnya di 90% wilayah yang mencatatkan harga beras di atas HAP. Fokus utama diberikan pada komoditas beras, daging ayam, dan bawang merah melalui penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan percepatan realisasi impor bawang putih pada februari 2026 untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
5. Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Perumahan RI menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk mendesak 231 Kabupaten/Kota untuk segera mengimplementasikan pembebasan biaya PBG dan BPHTB "0 Rupiah" bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini harus dijadikan instrumen struktural untuk menekan inflasi komponen perumahan sekaligus pengungkit ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan material lokal.
6. Diperlukan perbaikan sistem pendataan pembangunan dan harga dari tingkat daerah ke pusat (terutama pada 113 Kabupaten/Kota yang belum melapor). Akurasi data sangat krusial agar intervensi subsidi dan bantuan pangan tepat sasaran (berbasis data BPS dan Satgas Pangan) serta memastikan progres capaian RPJMN 2025-2029 terpantau secara *real-time*.
7. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan peran **TPID sebagai garda terdepan pengendalian inflasi**, dengan memastikan pemantauan harga dan stok dilakukan secara rutin (harian/mingguan), serta **intervensi cepat** pada komoditas strategis yang mengalami kenaikan harga dua minggu berturut-turut, khususnya cabai rawit, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng.
8. Seluruh Pemda perlu melaksanakan dan melaporkan secara konsisten langkah pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), sidak pasar, kerja sama antar daerah (KAD), pemanfaatan BTT, serta dukungan transportasi dan distribusi dari APBD, sebagai bentuk tindak lanjut nyata atas arahan pemerintah pusat.
9. Dengan stok pangan nasional yang aman, fokus kebijakan diarahkan pada kelancaran distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit, termasuk pemanfaatan dukungan TNI dalam menjaga akses logistik di wilayah rawan bencana dan terpencil, guna mencegah kelangkaan barang dan lonjakan harga di tingkat konsumen.
10. Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan 6 upaya konkret pengendalian inflasi (operasi pasar, sidak distributor, kerja sama antar daerah, realisasi BTT, dukungan transportasi APBD, dan gerakan menanam) dengan fokus pada komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah, beras, telur dan daging ayam ras.
11. Memperkuat sinergi TPID, Bapanas, BULOG, Kejaksaan, dan Satgas Pangan melalui pengawasan distribusi, pengendalian spekulasi, serta intervensi menjelang HBKN dan Ramadhan.
12. Mengoptimalkan pemantauan berbasis data (IPH, dashboard harga, neraca pangan) untuk memastikan kebijakan cepat, tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.

Memastikan percepatan tanam/panen serta dukungan sarana produksi pertanian guna

13. menjaga pasokan menjelang peningkatan permintaan musiman.
14. Memperkuat cadangan pangan pemerintah dan distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit untuk mencegah disparitas harga antarwilayah.

Adapun kegiatan pengendalian Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi di Triwulan I Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Menyusun Instruksi Gubernur Jambi tentang Gerakan Pembelian Beras Lokal/BULOG, Nomor: 1/INGUB/SETDA.PRKM/2026, tanggal 10 Februari 2026
 2. Menyusun Keputusan Gubernur Jambi tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi, Nomor: 119/KEP.GUB/SETDA.PRKM/2026, tanggal 9 Februari 2026
 3. Menerbitkan surat kebijakan mengenai Pelaksana Operasi Pasar Tahun 2026, tanggal 18 Februari 2026.
 4. Pada tanggal 18 Februari 2026 menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, turun langsung memimpin inspeksi mendadak (sidak) Tim Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi di Pasar Angso Duo
 5. Pada tanggal 25 Februari 2026 TPID Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Tahun 2026 yang dilaksanakan di Swiss BelHotel Jambi
 6. Pada tanggal 11 Maret 2026 Wakil Gubernur (Bapak Abdullah Sani) membuka Bazaar Gerakan Pangan Murah Tahun 2026 yang digelar di halaman depan TVRI Jambi, menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan langkah strategis pemerintah untuk membantu menstabilkan pasokan serta harga kebutuhan pokok Masyarakat serta Program tersebut juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
 7. TPID Provinsi Jambi menerbitkan surat tindaklanjut hasil High Level Meeting (HLM) TPID Tahun 2026 yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2026 yang dipimpin oleh Wakil Gubernur (Bapak Abdullah Sani) dan dihadiri Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi.
 8. TPID Provinsi Jambi menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, tanggal surat 25 Maret 2026.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Perlunya Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi atau antar Provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis, MOU yang sudah disepakati perlu ditindaklanjuti dengan Kerjasama Antar Daerah agar kegiatan yang akan dilaksanakan terealisasi dengan efektif.
 2. Dalam pembangunan BUMD Pangan di daerah diperlukan dukungan yang kuat dari Kepala Daerah. Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, maka diperlukan pembentukan BUMD Pangan mengingat Peran BUMD pangan sangat penting sebagai *off taker* hasil pangan lokal, sehingga dapat menjaga pasokan serta harga di tingkat petani dan masyarakat.
 3. Dalam pelaporan TPID Award, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi harus konsisten dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sejalan dengan roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun. Selanjutnya, perlu memunculkan aspek inovasi dan digitalisasi dalam perumusan program unggulan.
 4. Memperkuat peran dan fungsi TPID Provinsi Jambi sebagai media potensial dalam

mengendalikan inflasi sepanjang Tahun 2026 dengan melakukan penguatan kelembagaan TPID, bekerjasama dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi serta instansi terkait dalam peningkatan produksi, efisiensi rantai tata niaga, stabilitasi harga dan penyediaan sarana/prasaran penunjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Perlunya meningkatkan Peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kab/Kota di Provinsi Jambi sangat strategis dalam mendukung pengendalian inflasi provinsi maupun nasional;
- Pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dengan cukup signifikan karena berpotensi merugikan produsen seperti petani dan peternak, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi komoditas pangan.
- Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk membantu petani mencari langkah antisipai sehingga produksi komoditas pertanian/pangan tetap dapat dilakukan.

Dalam jangka pendek :

1. Menyusun data neraca pangan Provinsi Jambi sebagai dasar pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Perindag dan Bulog Provinsi Jambi dalam melaksanakan Operasi pasar dan Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilitasi harga bahan pokok pada bulan Januari s.d Desember 2026.
3. Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kota/kabupaten di Provinsi Jambi atau antar provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perlindungan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu terdampak inflasi. APBD merupakan tulang punggung utama untuk menggerakkan ekonomi, sehingga APBD harus tersalurkan tepat waktu termasuk pemberian bantuan sosial dan dana insentif lainnya.
5. Meningkatkan sinergi Pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi (Rakor) TPID berkala, serta meningkatkan sinergi dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), untuk tahun 2026, telah dilaksanakan GNPIP bersamaan dengan Pekan Nasional Qris di Hotel Aston Kota Jambi, antara lain dengan menggiatkan gerakan pemberian modal bagi pengusaha/UMKM yang bergerak dibidang budidaya cabai, timun, bawang merah, sawi, kangkung, kol dan lain-lain juga pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar (bekerjasama dengan Bank Indonesia).
6. Pemerintah kota/kabupaten perlu meningkatkan proses digitalisasi oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dalam jangka menengah/panjang:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengendalian Inflasi:
 - Monitoring dan evaluasi dan Pengawasan implementasi KAD agar tidak hanya berhenti dengan penandatanganan MoU dan PKS.
 - Mendorong Fasilitasi Kerjasama secara Business to Business (B2B), tidak hanya Government to Government (G2G)

Mendorong peran BUMD Pangan dalam Pelaksanaan KAD, baik untuk pemenuhan kebutuhan di daerah maupun pendistribusian ke daerah lain.

2. Kebijakan *extra effort* masih dilanjutkan sampai akhir tahun 2026 guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran;
3. Tersedianya data merupakan hal yang strategis guna mendukung kebijakan pengendalian harga pangan strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional sehingga perlu sinergi data dan informasi pangan antar lembaga dan/atau daerah yang mencakup harga, pasokan, dan jadwal panen;
4. Pemanfaatan data produksi pertanian sebagai identifikasi potensi KAD karena mayoritas produksi komoditas pangan masih terfokus di wilayah Indonesia bagian Barat terutama Pulau Jawa, sehingga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan;
5. Melaksanakan aktifitas sesuai dengan peta pangan strategis yang mengindikasikan posisi surplus dan defisit Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi.
6. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015-2027, untuk menjaga Inflasi di daerah;
7. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal;
8. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan
9. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga komoditas hortikultura dengan penyediaan mesin pengawet atau *cold storage*.